

## RENCANA AKSI KECAMATAN SUNGAI LOBAN, KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024

	TUJUAN				SASARAN	PROGRAM			KEGIATAN			SUE	B KEGIATAN	4110045411		JA	JADWAL KEGIATAN			DENAMOGUNO		
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TAR- GET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TAR- GET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TAR- GET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TWI	TW II	TW II	TW IV	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatk an Ketentrama n dan Ketertiban	Persentase Kejadian Kriminalitas yang Difasilitasi	100%	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi ('%)	100	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara a Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	33.738.600	Melaksanakan Koordinasi dengan TNI Polri di Wilayah Kecamatan, melaksanakan pembinaan Linmas dan siskamiling serta Temuwicara bersama masyarakat di setiap desa, dalam rangka menjaga Trantibum	1	V	1	√	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
													Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)			Melaksanakan Rapat koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk Harmonisasi Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat					
										Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi ('%)	100	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	75.820.400	Melaksanakan pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan bersama instansi terkait (TMI, Polri, Satpol PP, Bagian Hukum, dll)	1	√	1	√	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan Publik	4,01 (A-)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75%		Persentase terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	100	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ('%)	100	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	22	12.431.300	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan dan Kegiatan Pemerintahan bersama Bappeda, Bagian Pemerintahan Setda,	√	√	√	<b>V</b>	Seksi Pemerintahan
													Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)			Melaksanakan verifikasi dan Validasi data Profil dan Data Sarana prasarana					
										Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (%)	100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	13.177.500	Melaksanakan Pebinaan, Pendampingan dir Fasilitasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	٧	√	٧	<b>V</b>	Seksi Pelayanan Umum
										Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang difasilitasi (%)	100	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2	14.395.400	Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum	√	<b>V</b>	√	<b>V</b>	Seksi Pemerintahan

										Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)			Melaksanakan Pemeliharaan Fasilitas Umum dengan melibatkan pihak Swasta dan masyarakat, untuk memelihara Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum				
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat ('%)	100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakann (Dokumen)	200	15.610.900	Melaksanakan Pelayanan Perizinan, diantaranya : izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), Surat izin tempat usaha (SITU), Surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin penumoukan barang (IPB) dan izin usaha mikro kecil (IUMK)	7	7	1	Seksi Pelayanan Umum
										Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)			Melaksanakan Pelayanan Non Perizinan, diantaranya : Pengantar KTP, Pengantar KK, Pengantar Pindah penduduk, rekomendasi nikah, Registrasi ahli waris, rekomendasi SKCK, rekomendasi izin keramaian, Registrasi surat keterangan tidak mampu dan Registrasi proposal				
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan peran masyarakat dalam membangun kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang difasilitasi ("%)	100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	389.242.600	Partisipasi semua unsur dalam forum Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan desa		<b>V</b>	1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
										yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)			Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan pemerintah dan swasta, diantaranya : PKK,Lomba Desa,MTQ Kecamatan dan MTQ Kabupaten				
				AAN URUSAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)	100	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	85	64.448.400	Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	√	1	V	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

								Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)  Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)			Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan					
								Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)			Melaksanakan kerjasama dengan Polri dan TNI dalam hal penanganan Konflik Sosial untuk mendeteksi dini setiap kemungkinan konflik, mengaktifkan ronda dan peran Linmas					
								Pengembangan Kehidupar Demokrasi Berdasarkan Pancasila Pelaksanaan Tugas Forum	Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)			Melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam rangka kesadaran berdemokrasi berdasarkan Pancasila  Melaksanakan koordinasi					
								Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)			dengan Forkopimca diantaranya Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, ULWK, berkenaan					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	17 6	4.322.700	Melaksanakan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	√	√	<b>V</b>	·	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
								Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)			Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
								Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)			Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif diantaranya RPJMDes, RKPDes, APBDes,					

Sungai Loban, 03 Januari 2024

BERSUJUD AGUS SALIM, S.Ag., M.A.P Pembina Tingkat I NIP. 19710810 199803 1 012